

**PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
BELANJA DAERAH BIDANG PENDIDIKAN
PADA KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Diajukan oleh:

KRISTINA HANDAYANI

F.1306516

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2009

PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul :

**PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
BELANJA DAERAH BIDANG PENDIDIKAN
PADA KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI**

Telah diterima dan disetujui dengan baik
untuk diajukan ke hadapan tim penguji skripsi.

Surakarta, 2 Juni 2009

Disetujui dan diterima oleh

Dosen pembimbing

AGUS WIDODO. SE, Msi. Ak
NIP. 197308252000121001

PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji skripsi Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi

Surakarta, Juli 2009

Tim Penguji Skripsi :

1. Drs.Hanung Triatmoko, M.si,Ak Sebagai Ketua ()
NIP. 196610281992031001
2. Agus Widodo, SE, M.Si,Ak Sebagai Pembimbing ()
NIP. 197308252000121001
3. Doddy Setiawan, SE, Msi. Ak Sebagai Anggota ()
NIP. 197502182000121001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(Q.S. Al Baqarah: 286)

Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang yang beriman

(Q.S Ali Imran :139)

Karya kecil ini kupersembahkan kepada:

- 1. Bapak (Alm) dan Ibuku tercinta**
- 2. Kakakku Nnanang**
- 3. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat dan mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan baik materiil maupun non materiil dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Bapak Prof. DR. Bambang Sutopo, M.Com., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah Memberikan ijin menyusun skripsi.
2. Bapak Drs. Jaka Winarna, M.Si., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyetujui permohonan penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Falikhatun, M.Si., Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyetujui permohonan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Agus widodo,SE, M.Si., Ak selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmu teori maupun terapan.
6. Bapak (Alm) dan Ibuku tercinta yang telah memberikan dorongan, waktu, biaya, kasih sayang, kesabarannya dan doa kepadaku, kupersembahkan skripsi ini kepadamu.
7. Kakakku Nanang support kepadaku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Semoga budi baik yang telah Bapak, Ibu dan saudara berikan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat di masa sekarang dan yang akan datang.

Surakarta, Juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Belanja daerah Bidang pendidikan.....	8
B. Dana Alokasi Khusus (DAK).....	12
C. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	15
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	18
E. Kerangka Teoritis.....	21
F. Hipotesis.....	21

BAB III. METODE PENELITIAN.....	26
A. Desain Penelitian.....	26
B. Populasi, dan Sampel.....	26
C. Pengukuran Variabel.....	27
D. Jenis dan Sumber Data.....	30
E. Metode Pengumpulan Data.....	31
F. Metode Analisis Data.....	31
BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	37
B. Uji Asumsi Klasik.....	37
C. Analisis Statistik Deskriptif.....	42
D. Hasil Analisis Regresi.....	43
E. Pengujian Hipotesis.....	47
BAB V. PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Keterbatasan.....	51
C. Saran.....	52
D. Implikasi.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Uji normalitas data
Tabel 4.2	Uji Multikolinieritas
Tabel 4.3	Uji autokorelasi
Tabel 4.4	Statistik deskriptif
Tabel 4.5	Regresi DAK, PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan tanpa lag
Tabel 4.6	Regresi DAK, PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan tanpa dengan lag
Tabel 4.7	Analisis Faktor yang Paling Dominan Berpengaruh Terhadap BD
Tabel 4.8	Nilai dari koefisien Determinasi, Koefisien Korelasi dan Standar Error of Estimate dari Hasil Analisa Regresi
Tabel 4.9	Hasil Uji Anova tanpa lag
Tabel 4.10	Hasil Uji Anova dengan lag 1 tahun
Tabel 4.11	Hasil pengujian statistik t

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Uji Heterodasitas

ABSTRAK

PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH BIDANG PENDIDIKAN PADA KABUPATEN / KOTA DI SULAWESI

KRISTINA HANDAYANI
F 1306516

Penelitian ini untuk mengatehui pengaruh dari DAK dan PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari regresi sederhana mengindikasikan bahwa DAK berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah bidang pendidikan baik dengan regresi dengan lag maupun regresi tanpa lag. Sedangkan hasil dari PAD di regresi tanpa lag atau dengan lag mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan.

Waktu keduanya dibandingkan, regresi tanpa lag menunjukkan pengaruh yang lebih besar terhadap belanja daerah bidang pendidikan dari pada regresi dengan lag. Dalam regresi berganda, DAK mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah bidang pendidikan, tetapi PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan dan DAK mempunyai pengaruh yang dominan terhadap belanja daerah bidang pendidikan.

Pengaruh DAK terhadap belanja daerah bidang pendidikan lebih besar dibandingkan PAD terhadap belanjda daerah bidang pendidikan sehingga terjadi *Flypaper effect*.

Kata kunci : DAK, PAD, Belanja Daerah Bidang Pendidikan, *Flypaper Effect*

ABSTRACT

PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH BIDANG PENDIDIKAN PADA KABUPATEN / KOTA DI SULAWESI

KRISTINA HANDAYANI

F 1306516

The aim of this research is to examine the influence of DAK and PAD to the local government expenditures in education by using simple and multiple regressions. The results of simple regression indicate that DAK have positive significant effect to the local government expenditures in education, including with or without lag regression. However, results of PAD have negative no significant effect to the local government expenditures in education when using without lag regression, and using regression with lag PAD..

When both regression models compared, without lag regression is stronger to influence local government expenditures in education than with lag regression. In multiple regressions. DAK simultaneously has significant effect to the local government expenditures in education, but PAD have no significant effect to the local government expenditure in education and DAK more dominant to influence local government expenditures in education.

Influence of DAK is stronger to influence local government expenditures in education than PAD it indicates that there have flypaper effect.

Keywords : DAK, PAD, local government expenditures in education, Flypaper Effect

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah akhir – akhir ini membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi yang luas serta perimbangan keuangan yang lebih adil, proporsional dan transparan antar tingkat pemerintahan menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, MPR sebagai wakil rakyat menjawab tuntutan tersebut dengan menghasilkan beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Otonomi daerah adalah pemberian wewenang yang luas kepada daerah dalam mengatur, mengelola rumah tangganya sendiri. Berkaitan dengan hal ini, peranan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan tersebut.

Memasuki era desentralisasi yang dimulai pada tahun 2001, Pemerintah Pusat tetap memainkan peranan penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang didesentralisasikan ke Pemerintah Daerah (Pemda). Khususnya dalam hal keuangan. Untuk itu Pemerintah Pusat (Pempus) melakukan transfer dana ke daerah melalui beberapa mekanisme, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH). Ketiga dana perimbangan tersebut mempunyai tujuan dan sifat dasar berlainan satu dengan

yang lain. Semua dana perimbangan tersebut disalurkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu dalam pengelolaannya Pemda harus mempertanggungjawabkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Disamping itu pemerintah pusat juga menyediakan pinjaman dan bantuan kepada Pemda.

Tujuan transfer dana sebagaimana juga merupakan arah dari kebijakan fiskal pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, antara lain untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Hingga kini dana perimbangan masih merupakan penerimaan terbesar daerah. DAU bersifat hibah umum oleh karenanya pemda memiliki kebebasan dalam memanfaatkannya tanpa campur tangan pemerintah pusat. DBH adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang dialokasikan kembali kepada daerah dengan pembagian sebagaimana UU No.33/2004. DBH dibagi atas DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Berbeda halnya dengan kedua dana perimbangan tersebut, pemerolehan dan pemanfaatan DAK harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah – daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. daerah dapat menerima DAK apabila memenuhi tiga kriteria yaitu, kriteria umum berdasarkan indeks fiskal netto, kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah, kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait.

DAK digunakan untuk membangun sarana dan prasarana fisik. DAK yang khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini apabila dikelola dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan dan paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur. Hal ini sangat penting untuk menanggulangi kemiskinan dan membangun perekonomian nasional yang lebih berdaya saing.

Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping dalam APBD minimal 10% dari DAK yang diterima. Pengecualian dapat diberikan kepada daerah dengan kemampuan fiskal rendah. Selain itu, daerah juga diwajibkan menyediakan 3% dari nilai DAK yang diterima untuk biaya umum yang diambil dari sumber penerimaan lainnya. DAK dipakai untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan prioritas pada bidang kegiatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup

Selain dana perimbangan tersebut pemda juga memiliki pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah maupun penerimaan lain – lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan dana tersebut diserahkan ke pemda. Seharusnya sumber pendanaan tersebut digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dengan adanya transfer dana dari Pemerintah pusat tersebut bagi Pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam pelaksanaan kewenangannya. Namun dalam kenyataannya, transfer dana tersebut merupakan

sumber dana utama Pemda untuk membiayai belanja daerah. Seharusnya kekurangan dari transfer dana tersebut diharapkan dapat diambil dari sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Banyak peneliti sebelumnya menganalisis pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah baik di Pulau Jawa, Bali, bahkan Sumatra. Pada hasil analisis di Pulau Sumatra, diperoleh hasil yaitu, PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut berarti terjadi *Flypaper Effect*. Hal ini sesuai dengan hipotesisnya yang menyatakan pengaruh DAU terhadap BD lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap BD diterima. Menurut Maimunah (2006) *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi keuangan pemerintah daerah yang membelanjakan lebih banyak atau lebih boros dengan menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dibandingkan menggunakan dana sendiri (PAD).

Penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai hubungan antara pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) serta belanja daerah adalah Abdullah dan Halim (2003), Sulistyawan (2006), Maimunah (2006). Abdullah dan halim (2003) melakukan penelitian tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah, studi kasus Kabupaten / Kota Di Jawa dan Bali, yang menyimpulkan bahwa secara terpisah DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sehingga semakin tinggi jumlah DAU dan PAD maka semakin tinggi pula tingkat Belanja Daerah tersebut. Ketika DAU dan PAD di regres secara serentak dengan Belanja Daerah pengaruh keduanya juga signifikan.

Sulistiyawan (2006) melakukan penelitian tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah, studi kasus Kabupaten / Kota Di Sumatra, penelitian ini mendukung Abdullah dan Halim (2003) bahwa secara sederhana DAU, PAD, dan pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah, begitu juga ketika diregres secara serentak baik dengan atau tanpa lag. Tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) ketika dilakukan perbandingan antara regresi tanpa dan dengan lag.

Maimunah (2006) melakukan penelitian mengenai Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten / Kota Di Pulau Sumatera. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa PAD dan DAU mempengaruhi Belanja Daerah dan terjadi *flypaper effect*, dan tidak terdapat perbedaan terjadinya *flypaper effect* baik pada daerah yang PADnya rendah ataupun daerah yang PADnya tinggi di Kabupaten / Kota di Sumatera. Untuk belanja daerah dibidang pelayanan publik tidak terjadi *flypaper effect* pada belanja pendidikan sedangkan untuk belanja kesehatan dan pekerjaan umum terjadi *flypaper effect*.

Hampir semua penelitian melakukan penelitian yang meneliti mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah. Serta daerah yang digunakan sebagai sampel penelitian kebanyakan daerah Jawa dan Sumatra maka dalam penelitian ini penulis berkeinginan meneliti mengenai pengaruh Dana Alokasi khusus (DAK) di daerah Sulawesi, alasan lain dalam pengambilan sampel penelitian di Sulawesi adalah

karena didasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan Pemerintah daerah, karakteristik daerah di Sulawesi serta pertimbangan oleh Departemen teknis terkait yang menggambarkan kondisi sarana prasarana di kabupaten / kota di Sulawesi. Dana Alokasi Khusus (DAK) juga sangat berpengaruh pada belanja daerah khususnya belanja dibidang pelayanan publik yaitu bidang pendidikan yang mana bidang pendidikan adalah bidang pelayanan publik yang mendapat alokasi DAK terbesar serta belum ada penelitian yang dilakukan di Sulawesi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan judul **PENGARUH PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH BIDANG PENDIDIKAN PADA KABUPATEN / KOTA DI SULAWESI.**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil yaitu:

1. Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja daerah Bidang pendidikan Kabupaten / Kota di Sulawesi?
2. Apakah terjadi *flypaper effect* pada pengaruh DAK tahun sebelumnya dan PAD tahun sebelumnya terhadap prediksi belanja daerah bidang pendidikan tahun berjalan pada kabupaten / kota di Sulawesi?.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada :

1. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten / Kota di Sulawesi.
2. Kemungkinan terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah bidang pendidikan kabupaten / kota di Sulawesi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini tentunya akan bermanfaat bagi beberapa pihak yang berkepentingan, Departemen Keuangan dan departemen terkait yang tentunya dalam hal penyusunan kebijakan. Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Departemen Kkeuangan dan departemen terkait, memberikan masukan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal penyusunan kebijakan dimasa datang yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dari APBD dan APBN serta UU dan PP yang menyertainya.
2. Bagi penulis dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pada transfer dana DAK dan PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan yang dlakukan secara empiris pada Kabupaten / Kota di Sulawesi.
3. Bagi Universitas, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti – peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Belanja Daerah Bidang Pendidikan

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode Anggaran. (Abdul Halim, 2002). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda. Proses penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara keseluruhan berada di tangan Sekretraris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemda, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Bagian Penyusunan Program dan Bagian Keuangan).

1. Belanja Rutin

Dengan telah diberikannya wewenang untuk mengelola keuangan daerah, maka Belanja Rutin diprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas rutin perangkat daerah, termasuk perangkat eks Kanwil/Kandep yang telah dan akan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, perlu diupayakan penghematan untuk Belanja Rutin non Pegawai dengan cara memprioritaskan

pembiayaan terhadap belanja yang benar-benar urgen disertai dengan peningkatan disiplin anggaran. (Halim, 2002). Belanja rutin terdiri dari:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja pemeliharaan
- c. Belanja barang
- d. Belanja perjalanan dinas
- e. Belanja lain – lain, pension dan onderstand
- f. Bantuan keuangan
- g. Pengeluaran tidak termasuk bagian lain
- h. Pengeluaran tidak tersangka

2. Belanja Pembangunan

Belanja Pembangunan disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dalam pembangunan daerah, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaannya, sehingga kebutuhan mereka dapat dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan berdasarkan prioritas dan kemampuan daerah. (Halim, 2002)

Kelompok Belanja meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal (untuk Bagian Belanja Aparatur Daerah), dan meliputi Belanja administrasi Umum, Belanja Operasi

dan Pemeliharaan, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Tersangka (Untuk Bagian Belanja Pelayanan Publik).

a. Belanja Administrasi Umum

Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik dan bersifat periodik. Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis Belanja, yaitu:

- 1) Belanja Pegawai/Personalia.
- 2) Belanja Barang dan Jasa.
- 3) Belanja Perjalanan Dinas.
- 4) Belanja Pemeliharaan.

b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan

Kelompok Belanja ini merupakan semua belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi jenis belanja:

- 1) Belanja Pegawai/Personalia.
- 2) Belanja Barang dan Jasa.
- 3) Belanja Perjalanan Dinas.
- 4) Belanja Pemeliharaan.

Jenis belanja antara Belanja Operasi dan Pemeliharaan dengan Belanja Administrasi Umum memang sama, tapi yang berbeda adalah pada Objek Belanjanya.

3. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja Belanja Administrasi Umum. Kelompok belanja ini mencakup Jenis Belanja baik Untuk Bagian Belanja Aparatur Daerah maupun Pelayanan Publik.

4. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan berbentuk kegiatan pengalihan uang dan atau barang dari Pemerintah Daerah. Kelompok Belanja ini terdiri atas Jenis Belanja yang hanya untuk Bagian Belanja Pelayanan Publik, seperti Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (bagi provinsi), Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan, Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Profesi, dan belanja lainnya.

5. Belanja Tidak Tersangka

Kelompok Belanja Tidak Tersangka adalah belanja Pemerintah Daerah untuk Pelayanan Publik dalam rangka mengatasi bencana alam dan atau bencana sosial. Kelompok Belanja ini terdiri atas Jenis Belanja Tidak Tersangka.

Belanja bidang pendidikan merupakan belanja yang berhubungan langsung dengan belanja pelayanan publik. Belanja bidang pendidikan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, professional dan akuntabel, melibatkan masyarakat secara aktif, mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi kegiatan pendidikan secara langsung dan menggerakkan perekonomian masyarakat bawah.

B. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai tujuan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut UU No. 25 Tahun 1999, DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Dana perimbangan masih merupakan sumber penerimaan terbesar daerah. Sekitar 80% DAU yang dikelola daerah digunakan untuk belanja rutin, terutama gaji pegawai pemda. Oleh sebab itu, sumber utama daerah untuk membangun sarana dan prasarana fisik adalah dari DAK. Apabila DAK yang khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dikelola dengan baik, dana ini dapat digunakan untuk memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur. Hal ini sangat penting untuk menanggulangi kemiskinan dan membangun perekonomian nasional yang lebih berdaya saing.

DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Apabila dikelola dengan baik, DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional.

Perolehan dan pemanfaatan DAK oleh daerah harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. Daerah dapat menerima DAK apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu:

1. kriteria umum berdasarkan indeks fiskal neto.
2. kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah.
3. kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait.

Meskipun DAK termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam pemanfaatannya pemda harus mengikuti berbagai regulasi pusat, seperti UU, PP, Keputusan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri, Surat Edaran Direktur Jenderal, dan Surat Edaran Direktur Departemen. Dengan banyaknya regulasi pusat tersebut, sangat sedikit daerah yang mengeluarkan regulasi untuk memerinci kebijakan pengelolaan DAK. Dalam kaitan dengan

berbagai peraturan perundangan tersebut, banyak pihak di daerah menilai bahwa regulasi tentang DAK yang dikeluarkan Pemerintah Pusat sering kali terlambat dan tidak cocok dengan jadwal perencanaan dan penganggaran di daerah. Ketika isi regulasi pusat yang terbit terlambat itu ternyata berbeda dengan apa yang diperkirakan daerah sewaktu menyusun APBD, beberapa hal dalam APBD terpaksa harus diubah dan dimusyawarahkan lagi dengan DPRD. Proses seperti ini, selain menyita waktu aparatur pemerintah daerah, juga menghabiskan cukup banyak dana, padahal kemampuan keuangan daerah pada umumnya terbatas.

DAK sangat penting bagi pembangunan pendidikan karena pemerintah daerah lebih memprioritaskan belanja APBDnya untuk kebutuhan pegawai. Adanya DAK pendidikan menambah nilai dan porsi anggaran pendidikan terhadap keseluruhan belanja di daerah. DAK untuk belanja pembangunan pendidikan sangat memengaruhi naiknya anggaran pembangunan pendidikan di daerah. Untuk ke depan, pengelolaan DAK pendidikan sangat memerlukan perbaikan yang terarah. Bertambahnya kucuran DAK ke daerah setiap tahun semestinya disertai rancangan lebih terarah dan pemanfaatannya benar-benar untuk kepentingan rakyat dan bukan rancangan yang memberi peluang terjadinya kebocoran anggaran

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. (Bastian, 2002)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Halim (2002) Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, seperti pajak, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain – lain. Sedangkan diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan sana pembangunan dalam memenuhi belanja daerah, selain itu, PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana (subsidi) dari pemerintah pusat. Sumber PAD merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indicator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi daerah tersebut secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten / Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk Public Investment. Atau dengan kata lain Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya.

2. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan. Disamping itu menurut Kaho (dalam Maulida, 2007), ada beberapa ciri-ciri retribusi yaitu :

- a. Retibusi dipungut oleh negara
- b. Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk

- d. Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang / badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Dari uraian diatas dapat kita lihat pengelompokan retribusi yang meliputi :

- a. **Retribusi jasa umum, yaitu** : retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. **Retribusi jasa usaha, yaitu** : retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta.

3. Perusahaan Daerah

Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah.

- a. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat :
 - 1) Memberi jasa
 - 2) Menyelenggarakan pemanfaatan umum
 - 3) Memupuk pendapatan
- b. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan

mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.

- c. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.
- d. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, menurut Devas bahwa : kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Banyak peneliti sebelumnya menganalisis pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah baik di Pulau Jawa, Bali, bahkan Sumatra.

Pada hasil analisis di Pulau Sumatra, diperoleh hasil yaitu, PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut berarti terjadi *Flypaper Effect*. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan pengaruh DAU terhadap BD lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap BD diterima. Hasil ini konsisten dengan temuan-temuan sebelumnya, seperti Abdullah dan Halim (2003), Sulistyawan (2006) dan Maemunah (2006).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) bahwa secara terpisah DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sehingga semakin tinggi jumlah DAU dan PAD maka semakin tinggi pula tingkat belanja daerah tersebut. Ketika DAU dan PAD di regres secara serentak dengan belanja daerah maka keduanya juga mempunyai pengaruh yang signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawan (2006), menyimpulkan secara sederhana DAU dan PAD serta pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah, begitu juga ketika di regres secara serentak baik dengan datau tanpa lag. Tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Abdullah dan Halim (2003) ketika dilakukan perbandingan antara regresi tanpa dan dengan lag.

Penelitian yang dilakukan oleh Maemunah (2006), bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Bidang yang berhubungan langsung dengan publik, yaitu Belanja Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah pada Belanja Daerah Sektor yang

berhubungan langsung dengan masyarakat/publik juga masih terjadi *flypaper effect* atau tidak. Hasil yang didapat adalah bahwa untuk belanja bidang pendidikan tidak terjadi *flypaper effect*, sedangkan untuk belanja bidang kesehatan dan belanja bidang pekerjaan umum telah terjadi *flypaper effect*.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Variabel Penelitian

Abdullah dan halim (2003) melakukan penelitian untuk pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah, sedangkan dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pendidikan karena bidang pendidikan adalah penerima alokasi DAK terbesar.

2. Periode Penelitian

Abdullah dan Halim (2003) melakukan penelitian untuk data tahun 2001, sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan data laporan realisasi anggaran tahun 2006 dan 2007.

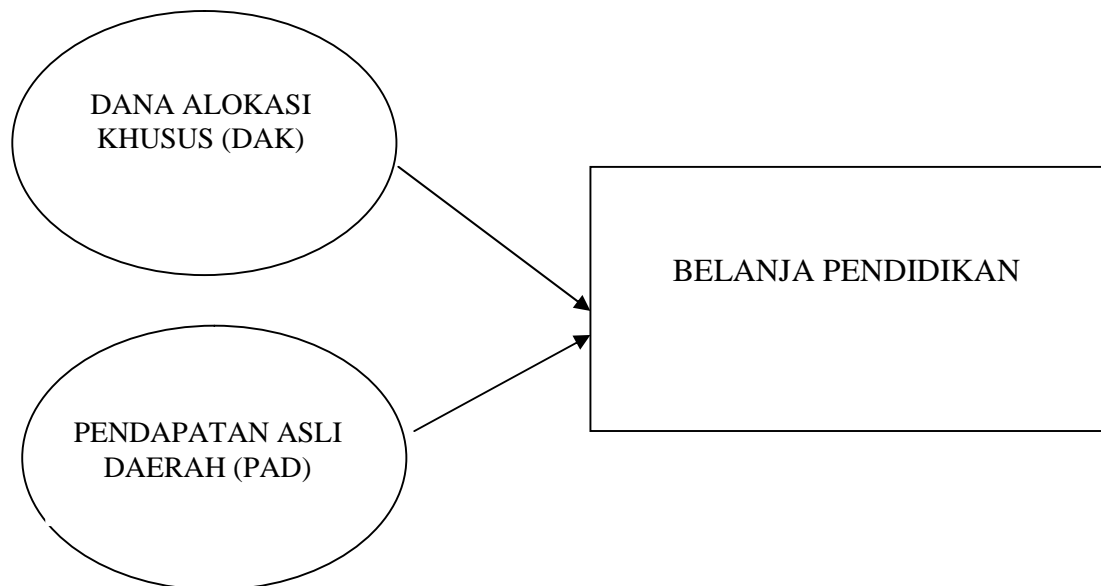
3. Sampel Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan halim (2003) menggunakan sample penelitian sebanyak 90 kabupaten / kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Pada penulisan skripsi ini penulis mengambil sampel Kabupaten / Kota di Sulawesi. Kabupaten / kota yang diteliti adalah kabupaten / kota yang telah mempublikasikan laporan keuangan auditan oleh BPK. Sampel penelitian sebanyak 36 kabupaten / kota di

Sulawesi yang telah mempublikasikan laporan keuangan auditan realisasi tahun 2006 dan 2007.

E. Kerangka Teoritis

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui besarnya pengaruh dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah bidang pendidikan.



F. Hipotesis

1. Pengaruh DAK terhadap Belanja daerah bidang pendidikan

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan tersebut diuji secara empiris (Chang & Ho, 2002)(dalam Abdullah dan Halim,2003). Sebagian studi menyatakan

bahwa pendapatan mempengaruhi belanja, sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan (Aziz, 2000; Doi, 1998). Sementara studi tentang pengaruh transfer atau *grants* dari Pempus terhadap keputusan pengeluaran atau belanja Pemda sudah berjalan lebih dari 30 tahun. Secara teoritis, respon tersebut akan mempunyai efek distributif dan alokatif yang tidak berbeda dengan sumber pendanaan lain, misalnya pendapatan pajak daerah. Namun, dalam studi empiris hal tersebut tidak selalu terjadi. Artinya, stimulus terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer atau *grants* tersebut sering lebih besar dibandingkan dengan stimulus dari pendapatan (pajak) daerah sendiri (*flypaper effect*).

Berdasarkan konsep dan temuan – temuan tersebut di atas, maka hipotesisi alternative untuk melihat pengaruh DAK tahun berjalan terhadap Belanja Daerah bidang Pendidikan tahun berjalan untuk Pemda Kabupaten / Kota di Sulawesi adalah sebagai berikut:

- a. H1a : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja daerah bidang pendidikan tahun berjalan.
- b. H1b : DAK tahun sebelumnya berpengaruh terhadap prediksi Belanja daerah bidang pendidikan tahun berjalan.

2. Pengaruh PAD terhadap Belanja daerah bidang pendidikan

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own source revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan. Abdullah dan Halim (2003), menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax-spend hypothesis*. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Hipotesis untuk menguji pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan Pemda Kabupaten / Kota di Sulawesi adalah sebagai berikut:

- c. H2a : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap Belanja daerah bidang pendidikan tahun berjalan.
- d. H2b : PAD sebelumnya berpengaruh terhadap prediksi Belanja daerah bidang pendidikan tahun berjalan.

3. Flypaper Effect dan Pengaruhnya pada Belanja Daerah Bidang Pendidikan

Flypaper Effect merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer dari Pemerintah Pusat lebih besar dari stimulus yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah. *Flypaper Effect* ini merupakan fenomena

utama dalam penelitian ini, dimana *flypaper effect* juga dapat disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diproksikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri, diproksikan dengan PAD. (Maimunah, 2006).

Pada Penelitian Mutiara Maimunah (2006) terjadi *flypaper effect* dalam merespon belanja transfer DAU dan PAD di Pulau Sumatra, ia juga meneliti bahwa *flypaper effect* berpengaruh untuk memprediksi Belanja Daerah periode kedepan dan juga tidak terdapat perbedaan terjadinya *flypaper effect* baik pada daerah yang PAD-nya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi di Kabupaten/Kota pulau Sumatra.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Legrenzi dan Milas (2001) (dalam Abdullah dan Halim, 2003) memberikan bukti empiris tentang adanya *flypaper effect* dalam jangka panjang untuk sample *municipalities* di Italia. Mereka menyatakan bahwa *local governments consistently increase their expenditure more with respect to increase in State transfer rather than increase in own revenues*. Karena itu terjadi *flypaper effect* dianggap sebagai suatu anomali dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai (tambahan) pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga mestinya dihabiskan (dibelanjakan) dengan cara yang sama pula (Hines & Thaler, 2005 yang dikutip oleh Maimunah, 2006)

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan diatas, maka hipotesis untuk *paper effect* di Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia adalah:

- e. H3 : Pengaruh DAK tahun sebelumnya terhadap prediksi Belanja daerah bidang pendidikan tahun berjalan lebih besar daripada pengaruh PAD tahun sebelumnya terhadap prediksi Belanja daerah bidang pendidikan tahun berjalan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian adalah suatu kesatuan ~~atau~~ integritas dari beberapa desain yang menggambarkan secara detail suatu penelitian (Sekaran, 2004). Tujuan dari

memahami desain penelitian adalah untuk memahami beberapa aspek yang berbeda dan relevan untuk mendesain suatu studi penelitian, menjamin keakuratan penelitian, meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan penelitian dan menjamin kemampuan generalisasi penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian *hypotheses testing* yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli daerah (PAD, terhadap Belanja Daerah bidang Pendidikan pada Kabupaten / Kota di Sulawesi. *Hypotheses testing* biasanya menjelaskan mengenai beberapa hubungan dan pengaruh antar variabel, memahami perbedaan antar kelompok, dan independensi antar variabel dalam suatu situasi (Sekaran, 2004). Penelitian ini dirancang untuk mengamati pengaruh dana bantuan (*transfer*) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di Sulawesi.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten / Kota yang terdapat di Sulawesi. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, dimana populasi yang akan dijadikan sampel penelitian adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu. Adapun kriteria – kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah: Kabupaten / Kota di Sulawesi yang telah menerbitkan laporan keuangan audit oleh BPK tahun realisasi 2006 – 2007. Sampel dalam penelitian ini adalah 36 kabupaten / kota di

Sulawesi yang telah mempublikasikan Laporan Keuangan auditan secara berturut – turut tahun 2006 – 2007.

C. Pengukuran Variabel

Variabel-variabel penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja daerah bidang pendidikan. Belanja daerah bidang pendidikan adalah bagian dari belanja daerah bidang pelayan publik yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan pendidikan. Atau dalam kata lain belanja bidang pendidikan merupakan pengeluaran kas daerah yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan Sembilan tahun yang bermutu. Belanja bidang pendidikan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, professional dan akuntabel, melibatkan masyarakat secara aktif, mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi kegiatan pendidikan secara langsung dan menggerakkan perekonomian masyarakat bawah.

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

a. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai tujuan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut UU No. 25 Tahun 1999, DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Apabila dikelola dengan baik, DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional. Perolehan dan pemanfaatan DAK oleh daerah harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. Daerah dapat menerima DAK apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu:

4. kriteria umum berdasarkan indeks fiskal neto.
5. kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah.
6. kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait.

DAK sangat penting bagi pembangunan pendidikan karena pemerintah daerah lebih memprioritaskan belanja APBDnya untuk kebutuhan

pegawai. Adanya DAK pendidikan menambah nilai dan porsi anggaran pendidikan terhadap keseluruhan belanja di daerah. DAK untuk belanja pembangunan pendidikan sangat memengaruhi naiknya anggaran pembangunan pendidikan di daerah. Untuk ke depan, pengelolaan DAK pendidikan sangat memerlukan perbaikan yang terarah. Bertambahnya kucuran DAK ke daerah setiap tahun semestinya disertai rancangan lebih terarah dan pemanfaatannya benar-benar untuk kepentingan rakyat dan bukan rancangan yang memberi peluang terjadinya kebocoran anggaran

b. Pendapatan Asli daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. (Bastian, 2002)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Halim (2002) Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, seperti pajak, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain – lain. Sedangkan diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sumber – sumber Pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten / Kota terdiri dari:

- a. Hasil Pajak Daerah,
- b. Hasil Retribusi Daerah,
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan (antara lain, bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah),
- d. Lain – Lain PAD yang sah (antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro)

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data Menurut Sifatnya

Data kuantitatif adalah data yang diukur dan biasanya berupa angka – angka atau bilangan – bilangan. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan asli Daerah (PAD) dan Belanja Pendidikan.

2. Jenis Data Menurut Sumbernya

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian. Data sekunder pada umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh lembaga tertentu yang dipublikasikan. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari laporan realisasi APBD Pemda Kabupaten / Kota di Sulawesi yaitu data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh dari

Departemen Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan dan Departemen Keuangan melalui internet serta sumber lain.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode studi pustaka adalah kegiatan pengumpulan dan analisis data untuk memperoleh informasi yang berguna bagi untuk dasar pembuatan keputusan dalam rangka pemecahan persoalan praktis dalam berbagai bidang maupun untuk pengembangan ilmu seperti penemuan teori atau metode analisis baru dalam bentuk rumus – rumus yang bersifat matematis. Dalam usaha memperoleh data dan informasi yang dilakukan penulis yaitu dengan membaca buku dan mencatat buku – buku, data – data yang ada di Departemen Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan dan Departemen Keuangan melalui internet serta sumber lain.

F. Metode Analisis Data

1. Teknis Analisis

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS v.16.0. Pengujian terhadap hipotesis dilakukan setelah regresi linear berganda yang digunakan bebas dari pelanggaran asumsi klasik. Hal ini bertujuan agar hasil perhitungan tersebut dapat diinterpretasi secara tepat dan efisien. Interpretasi hasil penelitian secara parsial (uji t) hanya dilakukan terhadap variabel bebas yang secara statistik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Setelah model regresi terbebas / lulus dari

uji klasikal model regresi layak dipakai dan kemudian dilakukan analisis regresi. Analisis ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independent DAK, dan PAD terhadap variabel dependen Belanja Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten / Kota di Sulawesi.

a. Model Analisis

Alat analisis yang digunakan adalah regresi sederhana (simple regression) dan regresi berganda (multiple regressions) yang digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran pemerintah. Regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh seluruh variabel tersebut secara serentak. Regresi berganda yang dipakai untuk memenuhi tujuan penelitian dalam membuktikan hipotesis dijabarkan di bawah ini dalam bentuk persamaan-persamaan, yaitu, Untuk menguji hipotesis tentang kekuatan variabel penentu (variabel bebas) terhadap belanja daerah bidang pendidikan, dalam penelitian ini digunakan model analitis Regresi berganda. Diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 +$$

Dimana: Y = belanja daerah bidang pendidikan.

A = Konstanta

X₁ = Dana Alokasi Khusus (DAK)

X₂ = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

β_{1,2} = Koefisien regresi DAK, PAD

ε = *Disturbance error* (faktor pengganggu/residual)

b. Pengujian Asumsi Klasik

Untuk menentukan ketepatan model regresi perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal Ghozali (2005). Sedangkan dasar pengambilan keputusan dalam deteksi normalitas:

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2005), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atas variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya bebas multikolinearitas atau tidak ada korelasi diantara variabel independen. Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance*

lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada data yang akan diolah.

3) Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) Ghazali (2005).

Untuk menguji keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini digunakan statistik d dari Durbin-Watson (*DW test*) dimana angka-angka yang diperlukan dalam metode tersebut adalah d_L (angka yang diperoleh dari tabel DW batas bawah), d_U (angka yang diperoleh dari tabel DW batas atas), $4 - d_L$ dan $4 - d_U$. Jika nilainya mendekati 2 maka tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya jika mendekati 0 atau 4 terjadi autokorelasi (+/-).. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika $0 < d < d_L$, maka terjadi autokorelasi positif
- b. Jika $d_L < d < d_U$, tidak ada kepastian apakah terjadi autokorelasi atau tidak (ragu-ragu)
- c. Jika $4 - d_L < d < 4$, maka terjadi autokorelasi negatif
- d. Jika $4 - d_U < d < 4 - d_L$, maka tidak ada kepastian apakah terjadi autokorelasi atau tidak (ragu-ragu)
- e. Jika $d_U < d < 4 - d_U$, maka tidak terjadi autokorelasi baik positif atau negatif

4) Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2005) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji Scatterplot. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang diprediksi dan sumbu X adalah residual. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola tertentu dan titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Pengujian Hipotesis

a) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi (R^2) dilihat pada hasil pengujian regresi linier berganda untuk variabel independen terhadap variabel dependennya.

Koefisien determinasi yang dilihat adalah nilai dari adjusted R^2

b) Uji F

Merupakan pengujian bersama–sama variabel independen yang dilakukan untuk melihat variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Melalui uji F (ANOVA) kita akan mengetahui apakah Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli berpengaruh secara simultan terhadap Belanja daerah bidang pendidikan.

c) Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji-T)

Merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji T dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Variabel independen dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai sig (p-Value) di bawah 5%. Melalui uji t ini kita akan mengetahui apakah Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli berpengaruh secara parsial terhadap Belanja daerah bidang pendidikan.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Populasi penelitian ini adalah kabupaten / kota yang berada di wilayah pulau Sulawesi, yang telah mempublikasikan laporan keuangan daerah tahun 2006 dan 2007 secara berturut – turut. Menggunakan wilayah pulau Sulawesi karena belum pernah ada yang melakukan penelitian di pulau Sulawesi. Semua Kabupaten / Kota di Sulawesi mendapatkan aliran dana alokasi khusus pada tahun penelitian.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dengan pertimbangan tertentu seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang telah ditentukan sebelumnya, maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 36 kabupaten / kota yang berada di Sulawesi dari tahun 2006 – 2007 yang telah mempublikasikan laporan keuangan daerahnya

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2006), uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil telah memenuhi kriteria sebaran atau distribusi normal.

Tabel 4.1
Uji Normalitas Data

	Belanja bidang pendidikan 2006	Belanja bidang pendidikan 2007	DAK 2006	PAD 2006
Sampel	36	36	36	36
Mean	7.1706E9	1.312E10	3.0247E10	3.5556E9
Std. Deviation	1.33066E9	2.84158E9	6.72052E9	1.30021E9

Absolute	0.129	0.167	0.109	0.166
Positive	0.129	0.167	0.071	0.096
Negative	-0.077	-0.114	-0.109	-0.166
Kolmogorov-Smirnov Z	0.776	0.999	0.651	0.997
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.584	0.271	0.790	0.274

Sumber : Hasil penelitian, 2009 (diolah).

Pada tabel 4.1 dapat dilihat interpretasi hasil uji normalitas dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* untuk variabel DAK, dan PAD masing-masing menunjukkan angka 0.651 dan 0.997 dengan tingkat probabilitas masing-masing diatas $\alpha = 0.05$ maka masing-masing variabel dapat dikatakan berdistribusi normal.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas merupakan suatu bentuk pengujian untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat adanya korelasi atau hubungan yang linier antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2006). Dalam hal ini variabel bebas itu yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Uji ini muncul karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. Uji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) (Ghozali, 2006). Jika hasil dari pengujian menunjukkan bahwa tidak ada nilai toleransi yang kurang dari 10% ataupun hasil perhitungan VIF yang menunjukkan bahwa tidak ada nilai VIF yang lebih dari 10 dari setiap variabel independen maka didalam model regresi tidak terdapat gejala adanya multikolonieritas antar variabel independen(Ghozali, 2006). Berikut ini adalah hasil dari uji multikolonieritas

tahun 2006 dan tahun 2007 menggunakan nilai toleransi dan nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) dengan menggunakan software SPSS. Hasil pengujian multikolonieritas tahun 2006 dan tahun 2007 adalah sebagai berikut dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
DAK	0.506	1.976
PAD	0.506	1.976

Sumber : Hasil penelitian, 2009 (diolah).

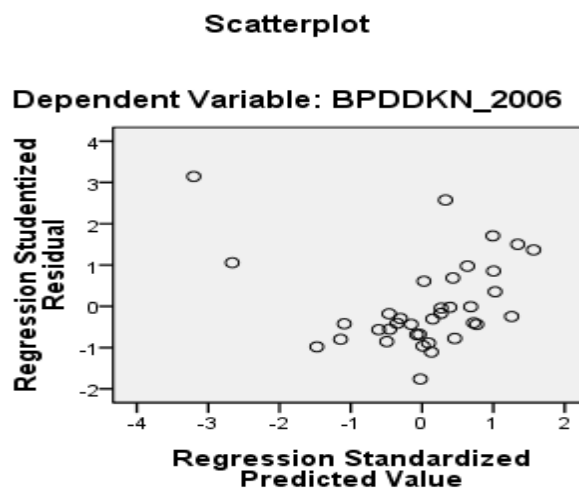
Berdasarkan hasil pengujian multikolonieritas pada tahun 2006 dan tahun 2007 pada tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance lebih dari 10% dan nilai VIF kurang dari 10 dari setiap independennya. Untuk itu maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas diperlukan dalam penelitian ini karena dari data yang ada mengandung data yang mewakili berbagai ukuran/

nilai yang beragam (ada data yang nilainya rendah, sedang, dan juga tinggi). Heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji Scatterplot.

Gambar 4.1
Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil penelitian, 2009 (diolah).

Dengan melihat gambar 4.1 dapat dilihat bahwa tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

4. Uji Autokorelasi

Ghozali (2006) menyatakan bahwa uji autokorelasi adalah sebuah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Jika terjadi korelasi nama dinamakan *problem*

autokorelasi. Autokorelasi diuji dengan menggunakan Durbin-Watson.

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- f. Jika $0 < d < d_1$, maka terjadi autokorelasi positif
- g. Jika $d_1 < d < d_u$, maka tidak ada kepastian apakah terjadi autokorelasi atau tidak (ragu-ragu)
- h. Jika $4 - d_1 < d < 4$, maka terjadi autokorelasi negatif
- i. Jika $4 - d_u < d < 4 - d_1$, maka tidak ada kepastian apakah terjadi autokorelasi atau tidak (ragu-ragu)
- j. Jika $d_u < d < 4 - d_u$, maka tidak terjadi autokorelasi baik positif atau negatif

Tabel 4.3
Hasil Uji Autokorelasi

	R	R Square	Adjusted R Square
Tanpa lag	0.648	0.420	0.384
Dengan lag	0.595	0.354	0.315

Sumber : Hasil penelitian, 2009 (diolah).

Karena nilai DW 1.837 lebih besar dari 1.76 dan kurang dari $4 - 1.587$ ($4 - d_u$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat dikatakan tidak ada autokorelasi.

C. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.4. jumlah Kabupaten / Kota yang menjadi sampel penelitian adalah 36 Kabupaten / Kota yang berada di Pulau Sulawesi. Nilai DAK 2006 tertinggi adalah Rp 42.305.000.000,- yaitu Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dan terendah adalah Kabupaten Kendari

Propinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar RP 8.150.000.000,00. PAD 2006 tertinggi berada di Kota Tomohon Propinsi Sulawesi Utara sebesar Rp5.499.650.000,- dan terendah di Kabupaten Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar Rp.798.360.000,00. Belanja daerah bidang pendidikan tertinggi tahun 2006 di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp.10.500.000.000,-, sekitar 32.49% dari DAK. Belanja daerah bidang pendidikan tahun 2007 sebesar Rp.19.890.000.000,- atau sekitar 29.49% dari DAK di Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara. Belanja daerah bidang pendidikan terendah tahun 2006 adalah kota pare – pare Sulawesi Selatan Rp.5.000.000.000,00, atau 16.97% dari DAK, sedangkan terendah untuk belanja daerah bidang pendidikan tahun 2007 adalah sebesar Rp.10.187.000.000,- atau 23.04% dari DAK yang berada di Kabupaten Pohnuatu Propinsi Gorontalo.

Tabel 4.4

Statistik Deskriptif

Nama Variabel	Sampel	Terendah		Teringgi		Rata – rata (jutaan)	Deviasi Standar
		(jutaan)	%	(jutaan)	%		
DAK 2006	36	815		42.305		30.246,581	6720519868.91776
PAD 2006	36	798,36		5.499,65		3.678,494	1208122590.71707
Belanja Daerah Bid. Pendidikan 2006	36	5.000	16.97	10.500	32.49	7.170,555	1330662443.92879
Belanja Daerah Bid. Pendidikan 2007	36	10.187	23.04	19.890	29.49	13.611,666	2841580033.31145

Sumber : Hasil penelitian, 2009 (diolah).

D. Analisis Hasil regresi

1. Regresi sederhana: pengaruh DAK dan PAD terhadap Belanja daerah bidang pendidikan Regresi tanpa lag

Pengujian atas pengaruh DAK dan PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara bersama –

sama kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan dan yang mana lebih dominan. Hasil regresi berganda dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.5
Regresi DAK, PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan tanpa lag

Variabel	B	t	Sig.
Constant	3298545205.937	4.054	0.000
DAK2006	0.141	3.826	0.001
PAD2006	-0.109	-.0529	0.600
R	0.648		
R Square	0.420		
Adjusted R Square	0.384		

Sumber : hasil olah data (2009).

Dari tabel diatas dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Bpddkn2006} = 3.298.545.205,937 + 0.141\text{DAK2006} + (-0.109)\text{PAD2006}$$

Dari persamaan diatas dapat dilihat besarnya konstanta adalah 3.298.545.205,937 hal ini berarti apabila tidak ada PAD ataupun DAK yang maka besarnya belanja daerah bidang pendidikan akan sama dengan nilai konstanta yaitu Rp. 3.298.545.205,937. Koefisien regresi DAK sebesar 0.141 menunjukkan bahwa jika DAK dari pemerintah pusat mengalami peningkatan sebesar 1% maka BPddkn di Kabupaten/Kota di Selawesi akan meningkat sebesar 0.141% dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Sedangkan koefisien regresi PAD sebesar -0.109 menunjukkan bahwa jika PAD mengalami peningkatan sebesar 1% maka BPddkn di Kabupaten/Kota di Selawesi akan berkurang sebesar 0.109% dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.

Hasil uji signifikansi pada tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa untuk DAK diperoleh t statistik sebesar 3.826 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang nilainya jauh dibawah taraf signifikansi yang ditolerir 0,05, maka H1a diterima, yang berarti DAK berpengaruh belanja daerah bidang pendidikan (BPddkn). Hal ini berarti semakin tinggi DAK dari pemerintah pusat maka semakin besar pula belanja daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. Sedangkan besarnya pengaruh DAK terhadap BPddkn ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 0.384 atau sebesar 38.4%. Sedangkan hasil uji signifikansi PAD menunjukkan bahwa untuk t statistik PAD sebesar -0.0529 dengan nilai sigifikansi sebesar 0.600 yang jauh diatas 5%, maka dengan demikian H2a tidak dapat diterima atau ditolak. Hal ini berarti bahwa PAD tidak mempengaruhi belanja daerah bidang pendidikan (BPddkn).

2. Regresi sederhana: pengaruh DAK dan PAD terhadap Belanja daerah bidang pendidikan Regresi tanpa lag

Pengujian atas pengaruh DAK dan PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan dengan lag dilakukan untuk mengetahui apakah DAKt-1 dan PADt-1 dapat memprediksi BPddknt. Dari hasil pengujian dapat diketahui hasil regresebagai berikut:

Tabel 4.6
Regresi DAK, PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan dengan lag

Variabel	B	t	Sig.
Constant	6196782610.172	3.380	0.002
DAK2006	0.308	3.702	0.001
PAD2006	-0.516	-1.115	0.273
R	0.595		

R Square	0.354
Adjusted R Square	0.315

Sumber : hasil olah data (2009).

Dari tabel 4.6 diatas dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Bpddkn2007} = 6.196.782.610,172 + 0.308\text{DAK2006} + (-0.516)\text{PAD2006}$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai nilai konstan adalah sebesar 6196782610.172. apabila tidak terdapat DAK atau PAD maka nilai belanja daerah bidang pendidikan adalah sebesar Rp.6196782610.172. Dari tabel 4.6 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien regresi untuk DAK adalah sebesar 0.308 hal ni menunjukkan apabila terdapat transfer DAK dari pusat sebesar 1% maka jumlah belanja daerah bidang pendidikan di Sulawesi akan mengalami peningkatan sebesar 0.308% dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Sedangkan apabila PAD meningkat 1% maka jumlah belanja akan berkurang sebesar 0.516% dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.

Hasil uji signifikansi pada tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa untuk DAK diperoleh t statistik sebesar 3.702 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang nilainya jauh dibawah taraf signifikansi yang ditolerir 0,05, maka H_0 diterima, yang berarti DAK berpengaruh belanja daerah bidang pendidikan (BPddkn). Hal ini berarti semakin tinggi DAK dari pemerintah pusat maka semakin besar pula belanja daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. Sedangkan besarnya pengaruh DAK terhadap BPddkn ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 0.315 atau sebesar 31.5%. Sedangkan hasil uji signifikansi PAD menunjukkan bahwa untuk t statistik PAD sebesar

-1.115 dengan nilai signifikansi sebesar 0.273 yang jauh diatas 5%, maka dengan demikian H2b tidak dapat diterima atau ditolak. Hal ini berarti bahwa PAD tidak mempengaruhi belanja daerah bidang pendidikan (BPddkn).

Untuk melihat adanya *flypaper effect* atau tidak dapat dilihat dari tabel 4.7 dibawah ini:

Tabel 4.7
Analisis Faktor yang Paling Dominan Berpengaruh Terhadap BD

Variabel	Reg-Partial t statistic
1. DAK tahun sebelumnya	3.702
2. PAD tahun sebelumnya	-1.115

Dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa nilai t statistik DAK tahun sebelumnya lebih besar dibanding nilai t statistik PAD tahun sebelumnya. Hal ini mengakibatkan munculnya *flypaper effect*. DAK tahun sebelumnya lebih besar daripada PAD tahun sebelumnya hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah bidang pendidikan lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah bidang pendidikan yang berarti juga bahwa pernyataan yang menyatakan bahwa pengaruh DAK tahun sebelumnya terhadap belanja pendidikan tahun berjalan lebih besar daripada pengaruh PAD tahun sebelumnya terhadap Belanja pendidikan tahun berjalan tidak dapat ditolak atau diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kabupaten / kota diSulawesi masih mengandalkan transfer dari pemerintah pusat.

E. Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya.

Tabel 4.8
Nilai dari koefisien Determinasi, Koefisien Korelasi
dan Standar Error of Estimate dari Hasil Analisa Regresi

	2006	2007
R	0.648	0.595
R Square	0.420	0.354
Adjusted R square	0.384	0.315
Std. Error of Estimasi	1.04403E9	2.35235E9

Sumber : hasil penelitian , 2009 (diolah)

Dari tabel 4.8 diatas dapat diketahui koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.420 untuk tahun 2006 dan 0.354 untuk tahun 2007. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0.420 untuk tahun 2006(tanpa lag) dan 0.354 untuk tahun 2007 (dengan lag 1 tahun), maka dapat diartikan bahwa 42% untuk tahun 2006 dan 35.4% untuk tahun 2007 belanja daerah bidang pendidikan dapat di jelaskan oleh kedua variabel bebas yang terdiri dari DAK dan PAD. Sedangkan sisanya 58% (2006) dan 64.6% (2007) di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam penelitian ini.

2. Hasil Uji F (Pengujian Regresi Bersama)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh DAK dan PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan. Hal ini dapat diketahui dengan melihat hasil F signifikan dengan $\alpha = 5\%$. Jika F signifikan $> \alpha$ maka H_0 diterima. Jika

F signifikan $< \alpha$ maka H_a diterima. Hasil pengujian tanpa lag 1 tahun ditunjukkan pada tabel 4.9 dibawah ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Anova tanpa lag

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2.600E19	2	1.300E19	11.928	0.000
Residual	3.597E19	33	1.090E18		
Total	3.197E19	35			

Sumber : hasil penelitian , 2009 (diolah)

Hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 4.9 menunjukan bahwa variabel-variabel independen yaitu DAK dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah bidang pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikan F sebesar 0.000 atau dibawah 5%. Sedangkan untuk hasil pengujian menggunakan lag 1 tahun dapat dilihat pada tabel 4.10 di bawah ini.

Tabel 4.10
Hasil Uji Anova dengan lag 1 tahun

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1.000E20	2	5.000E19	9.036	0.001
Residual	1.826E20	33	5.534E18		
Total	2.826E20	35			

Sumber : hasil penelitian , 2009 (diolah)

Hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa dalam pengujian dengan lag 1 tahun DAK dan PAD secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan. Hal ini di tunjukkan dengan tingkat signifikansi F sebesar 0.001 atau dibawah 5%.

3. Uji t (pengujian secara parsial)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh DAK dan PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan. Hal ini dapat diketahui denag melihat hasil t signifikan dengan $\alpha = 5\%$. Jika t signifikan $> \alpha$ maka hipotesis awal ditolak tetapi jika $t < \alpha$ maka hipotesis awal diterima. Hasil pengujian ditunjukan pada tabel 4.11 dibawah ini:

Tabel 4.11
Hasil pengujian statistik t

variabel	Tanpa lag		Dengan lag 1 tahun	
	t	Sig	t	Sig
DAK	3.826	0.001*	3.702	0.001*
PAD	-0.0529	0.600*	-1.115	0.273*

Sumber : hasil penelitian , 2009 (diolah)

Keterangan:

* = Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Dari tabel diatas setelah diadakan pengujian secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah bidang pendidikan

Dari nilai t-statistik untuk kedua regresi tampak bahwa DAK berpengaruh signifikan positif terhadap BPddknt, 3.826 untuk DAK dan 3.702 dengan

nilai signifikansi DAK 0.001 pada alpha 5%. Hal ini bermakna bahwa semakin besar DAK maka semakin besar pula belanja daerah bidang pendidikan tahun berjalan.

- b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah bidang pendidikan

Pada kedua regresi di atas masing – masing nilai t- statistik variabel PAD - 0.0529 untuk regresi tanpa lag dan -1.115 untuk regresi dengan lag 1 tahun dengan tingkat signifikan 5%. Untuk regresi tanpa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan karena nilai probabilitasnya lebih dari 5%. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat pendapatan asli daerah kabupaten / kota disulawesi. Serta masih menggandalkannya daerah pada dana hibah dan dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat dalam pengeluaran daerah. Sehingga dalam belanja daerah bidang pendidikan variabel PAD tidak berpengaruh, karena nilai dari PAD masih sangat kecil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja daerah bidang pendidikan di Sulawesi, dengan menggunakan sampel di 36

Kabupaten / Kota di Sulawesi. Pendapatan daerah yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah, sementara belanja daerah bidang pendidikan merupakan jumlah pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran dalam bidang pendidikan.

Dalam penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel penelitian berupa DAU, dan PAD menyimpulkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah dan terjadi *flypaper effect*. Ketika dihubungkan langsung dengan belanja bidang pendidikan terdapat kesimpulan tidak terjadinya *flypaper effect* dikarenakan pengaruh PAD lebih besar dibandingkan dengan pengaruh DAU.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAK mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan baik dengan lag maupun tanpa lag. Sedangkan Pendapatan Asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan di kabupaten / kota di Sulawesi baik dengan lag atau tanpa lag. Baik dengan lag maupun tanpa lag pengaruh DAK lebih besar dibandingkan pengaruh PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan hal ini berarti telah terjadi *flypaper effect*.

B. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian – penelitian berikutnya. Keterbatasan – keterbatasan penelitian ini adalah:

1. Sampel penelitian yang digunakan hanya 36 Kabupaten / Kota yang berada di Sulawesi, dan dalam penelitian ini tidak berdasarkan kelompok kemampuan

fiskal masing – masing daerah, sehingga tidak dapat diketahui dan tidak dapat dibandingkan pengaruhnya pada masing – masing kelompok fiskal.

2. Variabel yang diteliti hanya menggunakan 2 variabel yang mempengaruhi belanja daerah bidang pendidikan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan asli Daerah (PAD).
3. Data yang digunakan data sekunder yaitu laporan APBD realisasi tahun 2006 dan 2007. Sehingga belum dapat menggambarkan proksi perilaku pengalokasian sumber daya oleh *agents* dan politisi.
4. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan data *cross-section* yaitu tahun 2006 dan 2007.

C. Saran

Saran untuk pengembangan penelitian ini adalah:

1. Agar dalam penelitian yang akan datang agar menggunakan sampel penelitian yang lebih banyak agar hasil penelitian lebih objektif.
2. Pengelompokan sampel berdasarkan kemampuan fiskal daerah sehingga dapat diketahui dan dibandingkan pengaruhnya terhadap belanja daerah bidang pendidikan.
3. Peneliti selanjutnya agar memasukkan variabel – variabel lain yang dapat mempengaruhi belanja daerah bidang pendidikan.
4. Dibutuhkannya pendekatan lain yang lebih *feasible*, misalnya dengan melakukan *field research* atau eksperimen (dengan subjek eksekutif dan legislative daerah)

5. Sebaiknya digunakan data tuntutan waktu (*time series*).

D. Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah implikasi yaitu:

1. Bagi Departemen Keuangan dan departemen terkait memberikan masukan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal penyusunan kebijakan dimasa datang yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dari APBD dan APBN serta UU dan PP yang menyertainya.
2. Bagi Penulis dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pada transfer dana DAK dan PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan yang dilakukan secara empiris pada Kabupaten / Kota di Sulawesi.
3. Bagi Universitas, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti – peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- Halim, Abdul, *Bunga rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit AMP YKPN, Yogyakarta, 2004.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2004.
- Maimunah, Mutiara, *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra*, SNA IX, Padang 23-26 Agustus 2006.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE UII, 2000.

Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____. 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29/2002 tentang pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

_____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

_____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sekaran, Uma. *Metodelogi penelitian untuk Bisnis*, Salemba Empat. Jakarta, 2006.

Sukriy, Abdullah., & Abdul, Halim. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah: studi kasus kabupaten/kota di jawa dan bali*, SNAVI, Surabaya 16-17 Oktober 2003

Sulistyan, Eko, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah: studi kasus kabupaten/kota di Sumatra*, SNAIX, Padang 23-26 Agustus 2006.

Usman, Syaiku, M. Sulton Mawardi, Adri Poesoro, Asep Suryahadi, dan Charles Sampford *Mekanisme dan Penggunaan dana Alokasi Khusus*, Lembaga penelitian SMERU. Januari 2008.

UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (revisi atas UU No. 22/1999)

UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (revisi atas UU No. 25/1999)

www.BPK.go.id

www.sikd.djapk.go.id

www.DAK.BAPPENAS.go.id

www.depkeu.go.id

LAMPIRAN

NO	PROPINSI	KAB/KOTA	BD 2006		BD 2007	
			Rupiah	%	Rupiah	%
1	SULAWESI SELATAN	Kota Pare-Pare	5000000000.00	16.97	10259000000.00	31.55
2		Kab. Sinjai	7360000000.00	22.43	16183000000.00	32.01
3		Kab. Enrekang	6470000000.00	24.11	11282000000.00	30.96
4		Kab. Barru	6240000000.00	24.00	11501000000.00	31.08
5		Kab. Takalar	6550000000.00	23.05	13024000000.00	28.96
6		Kab. Wajo	7930000000.00	26.55	15955000000.00	35.50
7		Kab. Sidenreng Rappang	6640000000.00	24.41	12168000000.00	27.90
8		Kab. Bone	10500000000.00	32.49	19786000000.00	34.20
9	SULAWESI TENGGARA	Kota Kendari	6830000000.00	83.80	11630000000.00	31.54
10		Kab. Konawe	7070000000.00	19.72	15273000000.00	28.78
11		Kab. Wakatobi	9300000000.00	26.23	19890000000.00	29.48
12		Kab. Bombana	6270000000.00	23.56	13124000000.00	22.72
13		Kota Baubau	6320000000.00	21.52	10738000000.00	29.48
14		Kab. Buton	7540000000.00	21.44	16300000000.00	28.05
15		Kab. Muna	8250000000.00	24.88	16909000000.00	35.48
16		Kota Tomohon	9650000000.00	22.81	18117000000.00	26.37
17	SULAWESI UTARA	Kota Bitung	5570000000.00	27.28	10400000000.00	32.05
18		Kab. Minahasa Selatan	8710000000.00	25.02	15781000000.00	28.63
19		Kota Manado	7110000000.00	22.36	12067000000.00	39.05
20		Kab. Bolaang Mongondow	8170000000.00	21.53	17335000000.00	30.89
21		Kab. Minahasa	6290000000.00	21.66	16728000000.00	28.26
22		Kab. Kepulauan Talaud	9780000000.00	25.96	13633000000.00	26.08
23		Kab. Tojo Una - Una	6140000000.00	24.82	11555000000.00	26.17
24		Kota Palu	6050000000.00	29.03	10658000000.00	29.81
25	SULAWESI TENGAH	Kab. Banggai	7090000000.00	19.97	13805000000.00	27.24
26		Kab. Poso	8590000000.00	22.72	11945000000.00	23.51
27		Kab. Morowali	6690000000.00	25.81	11681000000.00	24.20
28		Kab. Toli-	6000000000.00	20.15	11775000000.00	28.28
29		Kab. Parigi Moutong	6880000000.00	22.29	13703000000.00	29.60
30		Kab. Donggala	8760000000.00	23.19	17331000000.00	26.98
31	SULAWESI BARAT	Kab. Polewali Mandar	7580000000.00	19.04	12484000000.00	27.03

32	GORONTALO	Kab. Pohuwato	5850000000.00	22.80	10187000000.00	23.04
33		Kota Gorontalo	5180000000.00	29.20	10647000000.00	30.82
34		Kab. Bone Bolango	6620000000.00	22.66	11481000000.00	26.90
35		Kab. Boalemo	5890000000.00	19.17	10270000000.00	22.76
36		Kab. Gorontalo	7270000000.00	22.84	14415000000.00	25.95

PROP	KOTA	DAK 2006	DAK 2007
SULAWESI SELATAN	Kota Pare-Pare	29460000000.00	32513516000.00
	Kab. Sinjai	32820000000.00	50563800000.00
	Kab. Enrekang	26830000000.00	36435500000.00
	Kab. Barru	26000000000.00	37003000000.00
	Kab. Takalar	28420000000.00	44979000000.00
	Kab. Wajo	29870000000.00	44938000000.00
	Kab. Sidenreng Rappang	27206475092.00	43610552600.00
	Kab. Bone	32320000000.00	57852081500.00
SULAWESI TENGGARA	Kota Kendari	8150000000.00	36879000000.00
	Kab. Konawe	35855000000.00	53071300000.00
	Kab. Wakatobi	35460000000.00	67477600000.00
	Kab. Bombana	26612000000.00	57768344788.00
	Kota Baubau	29365000000.00	36422000000.00
	Kab. Buton	35170000000.00	58108000000.00
	Kab. Muna	33160000000.00	47655700000.00
	Kota Tomohon	42305000000.00	68710000000.00
SULAWESI UTARA	Kota Bitung	20420000000.00	32450000000.00
	Kab. Minahasa Selatan	34808000000.00	55122000000.00
	Kota Manado	31800000000.00	30898500000.00
	Kab. Bolaang Mongondow	37940000000.00	56111000000.00
	Kab. Minahasa	29046000000.00	59189000000.00
	Kab. Kepulauan Talaud	37670000000.00	52276950000.00
	Kab. Tojo Una - Una	24741000000.00	44147685700.00
	Kota Palu	20839885000.00	35755000000.00
SULAWESI TENGAH	Kab. Banggai	35503432000.00	50672000000.00
	Kab. Poso	3780700000.00	50803558165.00
	Kab. Morowali	25920000000.00	48260800000.00
	Kab. Toli-	29770000000.00	41638325274.00
	Kab. Parigi Moutong	30865571000.00	46287000000.00
	Kab. Donggala	37770000000.00	64240000000.00
	Kab. Polewali Mandar	39812594522.00	46177450000.00
SULAWESI BARAT	Kab. Polewali Mandar	39812594522.00	46177450000.00

GORONTALO	Kab. Pohuwato	25660010000.00	44211300000.00
	Kota Gorontalo	17740000000.00	34546181200.00
	Kab. Bone Bolango	29209980000.00	42676000000.00
	Kab. Boalemo	30720000000.00	45121000000.00
	Kab. Gorontalo	31830000000.00	55544000000.00

NO	PROPINSI	KAB/KOTA	2006	2007
1	SULAWESI SELATAN	Kota Pare-Pare	3829800000.00	4226757080.00
2		Kab. Sinjai	4266600000.00	6573294000.00
3		Kab. Enrekang	3487900000.00	4736615000.00
4		Kab. Barru	3380000000.00	4810390000.00
5		Kab. Takalar	3694600000.00	5847270000.00
6		Kab. Wajo	3883100000.00	5841940000.00
7		Kab. Sidenreng Rappang	3536841761.96	5669371838.00
8		Kab. Bone	4201600000.00	7520770595.00
9	SULAWESI TENGGARA	Kota Kendari	1059500000.00	4794270000.00
10		Kab. Konawe	4661150000.00	6899269000.00
11		Kab. Wakatobi	1063800000.00	2024328000.00
12		Kab. Bombana	798360000.00	1733050343.64
13		Kota Baubau	3817450000.00	4734860000.00
14		Kab. Buton	4572100000.00	7554040000.00
15		Kab. Muna	4310800000.00	6195241000.00
16		Kota Tomohon	5499650000.00	8932300000.00
17		Kota Bitung	2654600000.00	4218500000.00
18		Kab. Minahasa Selatan	4525040000.00	7165860000.00
19	SULAWESI UTARA	Kota Manado	4134000000.00	4016805000.00
20		Kab. Bolaang Mongondow	4932200000.00	7294430000.00
21		Kab. Minahasa	3775980000.00	7694570000.00
22		Kab. Kepulauan Talaud	4897100000.00	6796003500.00
23		Kab. Tojo Una - Una	3216330000.00	5739199141.00
24		Kota Palu	2709185050.00	4648150000.00
25		Kab. Banggai	4615446160.00	6587360000.00
26		Kab. Poso	491491000.00	6604462561.45
27		Kab. Morowali	3369600000.00	6273904000.00
28		Kab. Toli-	3870100000.00	5412982285.62
29	SULAWESI TENGAH	Kab. Parigi Moutong	4012524230.00	6017310000.00
30		Kab. Donggala	4910100000.00	8351200000.00

31	SULAWESI BARAT	Kab. Polewali Mandar	5175637287.86	6003068500.00
32	GORONTALO	Kab. Pohuwato	3335801300.00	5747469000.00
33		Kota Gorontalo	2306200000.00	4491003556.00
34		Kab. Bone Bolango	876299400.00	5547880000.00
35		Kab. Boalemo	3993600000.00	5865730000.00
36		Kab. Gorontalo	4137900000.00	7220720000.00

Descriptives

[DataSet0]

Descriptive Statistics

		Sum	Sum of Squares	Mean	Standard Deviation
	36	5.00E9	1.05E10	7.1706E9	1.33066E9
	36	8.15E9	4.23E10	3.0247E10	6.72052E9
	36	7.98E8	5.50E9	3.6785E9	1.20812E9
	36				

Regression

Variables Entered/Removed^b

	Entered	Removed	Model
	2006 ^a		1

Variables entered.

Variable: BPDDKN_2006

Model Summary^b

	Adjusted R Square	Adjusted R Square	Adjusted R Square	Adjusted R Square	Adjusted R Square
	.648 ^a	.420	.384	1.04403E9	1.681

Constant), PAD_2006, DAK_2006

Variable: BPDDKN_2006

ANOVA^b

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	2.600E19	2	1.300E19	11.928	.000 ^a
	3.597E19	33	1.090E18		
	6.197E19	35			

Constant), PAD_2006, DAK_2006

Variable: BPDDKN_2006

Coefficients^a

	Standardized Coefficients		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Durbin-Watson	
	Beta	Standard Error	Model	Unstandardized			1	2
	3.299E9	8.136E8		4.054	.000		.506	1.976
	.141	.037		3.826	.001			

Model Summary^b

		are	R Square	the Estimate	Watson			
		.648 ^a	.420	.384	1.04403E9	1.681		
			-.109	.205	-.099	-.529	.600	.506
								1.976

iable: BPDDKN_2006

Coefficient Correlations^a

	006	006
	1.000	-.703
	-.703	1.000
	.042	-.005
	-.005	.001

iable: BPDDKN_2006

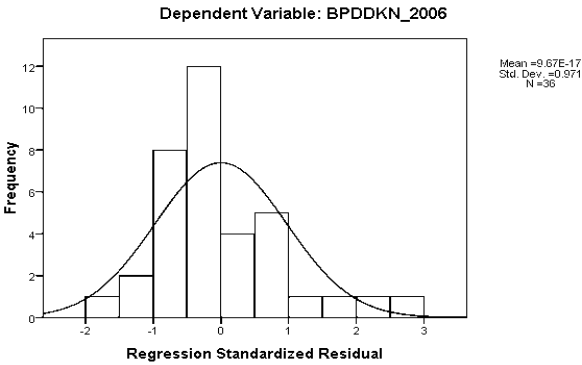
Collinearity Diagnostics^a

	alue	on Index	Variance Proportions		
			ant)	006	006
	2.936	1.000	.01	.00	.01
	.049	7.768	.46	.00	.51
	.015	13.807	.54	1.00	.49

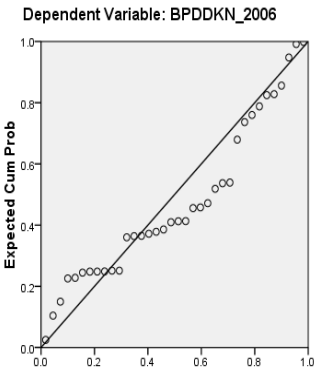
iable: BPDDKN_2006

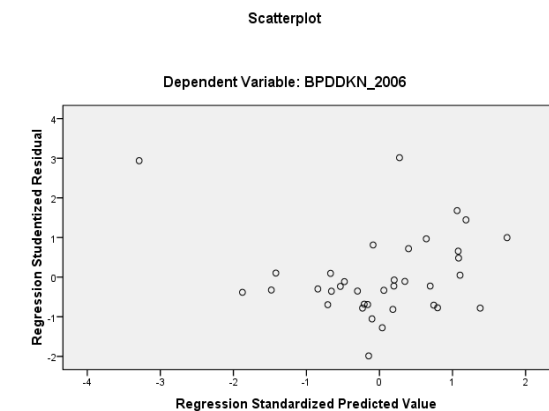
Charts

Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual





Descriptives

Descriptive Statistics

		Sum	Sum of Squares	Mean	Standard Deviation
	36	1.02E10	1.99E10	1.3612E10	2.84158E9
	36	8.15E9	4.23E10	3.0247E10	6.72052E9
	36	7.98E8	5.50E9	3.6785E9	1.20812E9
	36				

Regression

Variables Entered/Removed^b

	Variables Entered	Variables Removed	Model
1	BPDDKN_2006 ^a		

a. Dependent Variable:

BPDDKN_2007

Model Summary^b

	Model	Sum of Squares	R Square	Adjusted R Square	Standard Error of the Estimate	Cohen's f ²
1	1	2.35235E9	.315	.235	1.668	.595 ^a

a. Predictors: (Constant), PAD_2006, DAK_2006

b. Dependent Variable: BPDDKN_2007

ANOVA^b

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	1.000E20	2	5.000E19	9.036	.001 ^a
2	1.826E20	33	5.534E18		
3	2.826E20	35			

a. Predictors: (Constant), PAD_2006, DAK_2006

b. Dependent Variable: BPDDKN_2007

Coefficients^a

Model Summary^b

	are	R Square	the Estimate	Watson			
	.595 ^a	.354	.315	2.35235E9	1.668		
	ndarized Coefficients		d Coefficients		earity Statistics		
	Error	eta		nce			
	6.197E9	1.833E9		3.380	.002		
	.308	.083	.728	3.702	.001	.506	1.976
	-.516	.463	-.219	-1.115	.273	.506	1.976

iable: BPDDKN_2007

Coefficient Correlations^a

	006	006
	1.000	-.703
	-.703	1.000
	.214	-.027
	-.027	.007

iable: BPDDKN_2007

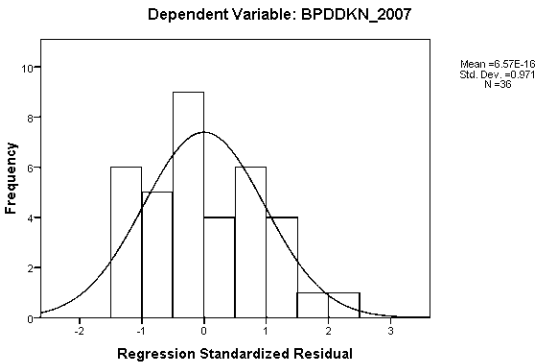
Collinearity Diagnostics^a

	alue	on Index	Variance Proportions		
			ant)	006	006
	2.936	1.000	.01	.00	.01
	.049	7.768	.46	.00	.51
	.015	13.807	.54	1.00	.49

iable: BPDDKN_2007

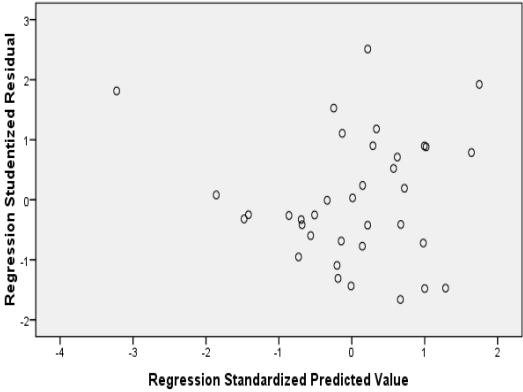
Charts

Histogram



Scatterplot

Dependent Variable: BPDDKN_2007



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

